

## PENGARUH MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP PRAKTIK MANAJEMEN LABA PADA INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Nurlina, Adityawarman<sup>1</sup>

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

### ABSTRACT

*The purpose of this study is to examine whether the corporate governance mechanism affect the practice of earnings management in the Islamic banking industry in Indonesia. Internal governance mechanisms can supervise manager actions more effectively than external governance mechanisms. Therefore, this study focuses on internal governance mechanisms. The method of data collection in this study is documentation. The sample of this research is Sharia Commercial Banks in Indonesia which are determined by applying the purposive sampling method. After applying the method, there are 11 Sharia Commercial Banks that meet the criteria as research samples. The analytical method used in this study is panel regression with FEM (Fixed Effect Model) in the first stage and REM (Random Effect Model) in the second stage. The results of this study reveal that the size of the Board of Commissioners, the size of the Audit Committee, and the size of the SSB (Sharia Supervisory Board) are significant and positively affect the earnings management practices. In addition, this study successfully confirmed that the SSB competency is significant and negatively affect the earnings management practices. However, the number of Board of Commissioners meetings, the independence of the Board of Commissioners, the number of Audit Committee meetings, and the number of SSB meetings were not proven to affect earnings management practices.*

*Keywords: Corporate governance, earnings management, SSB*

### PENDAHULUAN

Pada dasarnya, etika dan nilai moral dapat mencegah terjadinya manajemen laba dalam suatu perusahaan (Mersni dan Ben Othman, 2016). Sumber utama dari etika dan nilai moral adalah agama. Larangan terhadap praktik manajemen laba oleh prinsip syariah terkait dengan prinsip *ibahah* atau yang dikenal juga dengan istilah *mubah* (diperbolehkan). Pada intinya, prinsip *ibahah* adalah memperbolehkan penggunaan cara apapun dalam mencapai sesuatu selama cara tersebut tidak dilarang dalam Alqur'an dan Sunnah. Pada faktanya, industri perbankan syariah berpotensi melakukan praktik manajemen laba karena bank syariah juga memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan (Imam dan Kpodar, 2016). Tujuan tersebut dapat mendorong dilakukannya manipulasi terhadap hasil yang diperoleh (Othman dan Mersni, 2014). Menurut Chong dan Liu (2009), mayoritas bank syariah yang ada di Malaysia menerapkan prinsip nonbagi hasil yang diizinkan oleh aturan syariah, tetapi mengabaikan larangan riba. Chong dan Liu (2009) juga menjelaskan bahwa deposito mudharabah di bank syariah yang ada di Malaysia tidak benar-benar bebas dari bunga, melainkan sama dengan deposito pada bank konvensional. Dengan demikian, adanya praktik manajemen laba menunjukkan bahwa pada bank syariah masih terdapat masalah keagenan diantara pihak-pihak yang berkepentingan.

Penelitian ini menggunakan CKPN diskresioner sebagai alat untuk mendeteksi praktik manajemen laba di bank syariah. Pada tabel 1 disajikan nilai CKPN diskresioner pada 11 Bank Umum Syariah di Indonesia.

---

<sup>1</sup> Corresponding author

**Tabel 1**  
**CKPN Diskresioner pada BUS Tahun 2017**

No	BUS	CKPN Diskresioner (dalam miliaran rupiah)
1	BCAS	59,42
2	BRIS	651,43
3	BNIS	348,44
4	BSM	767,38
5	BBS	162,93
6	BMS	15,18
7	BMS	452,00
8	BPS	416,51
9	BVS	8,26
10	BMSI	49,98
11	BJBS	804,33

Sumber: Laporan Tahunan

Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat diketahui bahwa dengan menerapkan metode CKPN, yakni dengan mengurangi CKPN nondiskresioner terhadap total CKPN, diketahui bahwa semua Bank Umum Syariah (BUS) yang dijadikan sampel teridentifikasi melakukan manajemen laba.

Adanya peluang keterjadian manajemen laba mendorong pemegang saham untuk menerapkan mekanisme pengendalian dalam rangka mengendalikan hubungan keagenan antara manajer dan pemegang saham. Tata kelola perusahaan merupakan metode yang paling efektif untuk meminimalisasi praktik manajemen laba (Marrakchi Chtourou, Bédard, dan Courteau, 2001). Dengan demikian, tata kelola berperan sebagai pengendalian bagi perilaku diskresioner manajer (Roodposhti dan Chashmi, 2010). Pada dasarnya, penelitian dilakukan untuk menginvestigasi bagaimana pengaruh mekanisme tata kelola terhadap praktik manajemen laba oleh manajer pada bank syariah.

## **KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

Praktik manajemen laba berkaitan erat dengan hubungan keagenan antara manajemen dan pemegang saham. Menurut Jensen dan Meckling (1976), hubungan keagenan merupakan suatu keterikatan antara satu atau beberapa prinsipal dengan agen. Prinsipal mendapatkan layanan dari agen berupa pendelegasian otoritas pengambilan keputusan. Jika baik agen maupun prinsipal berusaha memaksimalkan utilitas mereka sendiri, maka dapat dipastikan bahwa kinerja agen adalah untuk memenuhi kepentingannya sendiri (*self-serving behavior*) (Jensen dan Meckling, 1976). Untuk mengatasi hal tersebut, prinsipal dapat memberikan insentif yang sesuai untuk agen dan dengan melakukan pengawasan untuk mengendalikan tindakan menyimpang agen. Efektivitas dewan dalam melakukan pengawasan dipengaruhi oleh adanya informasi asimetri diantara anggota dewan. Masalah tersebut dapat membatasi efektivitas anggota dewan khususnya di perusahaan besar. Keterbatasan informasi tersebut dapat mengurangi kemampuan anggota dewan untuk berkontribusi secara efektif dalam mengawasi dan mengevaluasi manajer dan strategi perusahaan (Jensen, 1993).

Menurut Jensen dan Meckling (1976), pemegang saham memiliki kecenderungan untuk mengeluarkan lebih banyak sumber daya dalam mengawasi perilaku manajer. Pengeluaran sumber daya berupa audit, sistem kontrol formal, pembatasan anggaran, dan pembentukan sistem kompensasi insentif merupakan metode untuk mengalihkan manajer dalam mengejar keuntungan nonkeuangan. Dengan demikian, pemegang saham akan mengorbankan banyak sumber daya untuk memastikan bahwa manajer bertindak sesuai dengan kepentingan mereka. Bendickson, Muldoon, W, Philip, dan Davis (2016) menyatakan bahwa terdapat 2 pandangan mengenai teori keagenan, yaitu penelitian prinsipal-agen dan teori keagenan positif. Penelitian prinsipal-agen mengidentifikasi 2 kemungkinan masalah keagenan, yaitu pembagian risiko dan pengawasan agen. Kedua masalah tersebut sebenarnya memiliki keterkaitan, pembagian risiko akan menyebabkan

informasi asimetri, yang pada akhirnya akan mengurangi kemampuan prinsipal dalam mengawasi perilaku agen. Teori keagenan positivis berfokus pada peran mekanisme pengelolaan dalam membatasi perilaku *self-serving* agen (Eisenhardt, 1989). Mekanisme tersebut diyakini dapat memberikan keselarasan tujuan yang diinginkan oleh prinsipal dan agen sehingga meminimalisasi terjadinya konflik kepentingan (Bendickson et al., 2016).

### **Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Praktik Manajemen Laba**

Quttainah, Song, dan Wu (2013) mengungkapkan bahwa Dewan Komisaris dengan jumlah anggota yang banyak dapat meminimalisasi terjadinya manajemen laba di bank syariah. Selaras dengan temuan tersebut, Marrakchi Chtourou, Bédard, dan Courteau (2001) juga mengkonfirmasi bahwa Dewan Komisaris yang lebih besar akan berdampak pada kinerja yang lebih efektif. Penelitian Marrakchi Chtourou et al. (2001) secara lebih rinci melaporkan bahwa ukuran dewan yang lebih besar dapat menghambat kegiatan manajemen laba. Xie, Davidson, dan Dadalt (2003) mengemukakan bahwa dewan komisaris dengan jumlah anggota yang terlampaui banyak dapat meminimalisasi tingkat akrual diskresioner. Hasil penelitian tersebut dikonfirmasi oleh Peasnell, Pope, dan Young (2005) yang menyatakan bahwa jumlah anggota dewan komisaris yang banyak berhubungan dengan keahlian yang memadai dalam meningkatkan kemampuannya untuk mencegah tindakan menyimpang oleh manajer. Dengan demikian, hipotesis yang sesuai dengan pemaparan di atas adalah sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: ukuran Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba.

### **Pengaruh Independendensi Dewan Komisaris terhadap Praktik Manajemen Laba**

Roodposhti dan Chashmi (2010) melaporkan adanya hubungan negatif antara Komisaris Independen dan manajemen laba yang diukur berdasarkan akrual abnormal. Dengan kata lain, semakin sedikit jumlah Komisaris Independen maka akan menyebabkan peningkatan akrual abnormal. Peasnell et al. (2005) juga mengungkapkan bahwa kemungkinan manajer dalam melakukan manipulasi laba untuk menghindari pelaporan kerugian dan pengurangan laba adalah berhubungan secara negatif dengan ukuran Komisaris Independen. Pentingnya peran Komisaris Independen diperkuat oleh penelitian Joubert dan Fakhfakh (2011) yang membuktikan bahwa pemantauan oleh Komisaris Independen merupakan determinan kuat bagi manajemen laba di Kanada dan Perancis. Meskipun demikian, menurut Sun dan Liu (2013), kontribusi Komisaris Independen dalam mengatasi manajemen laba harus didukung oleh spesialisasi industri auditor. Dengan demikian, hipotesis yang sesuai dengan pemaparan di atas adalah sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: independensi Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba.

### **Pengaruh Jumlah Rapat Dewan Komisaris terhadap Praktik Manajemen Laba**

Chen, Firth, Gao, dan Rui (2006) mengungkapkan bahwa jumlah rapat Dewan Komisaris memiliki keterkaitan dengan praktik penipuan dalam perusahaan. Sekain itu, Xie et al. (2003) juga melaporkan bahwa intensitas rapat Dewan Komisaris berperan secara signifikan dalam meminimalisir keterlibatan manajer dalam praktik manajemen laba. Menurut Xie et al. (2003), intensitas rapat berpengaruh terhadap efektivitas fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris. Penelitian Al-najjar (2017) juga mengkonfirmasi bahwa permintaan untuk rapat dewan yang lebih banyak merupakan sinyal untuk pengawasan internal yang lebih baik. Dengan demikian, hipotesis ke-3 yang sesuai dengan penjelasan di atas adalah:

H<sub>3</sub>: jumlah rapat Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba.

### **Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Praktik Manajemen Laba**

Berdasarkan Cadbury Committee (1992), praktik terbaik menyarankan bahwa Komite Audit minimal beranggotakan tiga anggota. Adanya batas minimum tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dan memenuhi aspek keberagaman, baik keragaman keahlian maupun keragaman gagasan atau pendapat untuk memastikan aktivitas pemantauan yang efektif (Cadbury Committee, 1992). Peraturan Tata Kelola Perusahaan Malaysia mensyaratkan komite audit terdiri dari minimal tiga anggota (Saleh, Iskandar, dan Rahmat, 2005). Peraturan tersebut mengindikasikan bahwa jumlah anggota memiliki peran yang dominan Selain itu, Mersni dan Ben Othman (2016) melaporkan bahwa bank syariah dengan Komite Audit Syariah eksternal memiliki

kredibilitas pelaporan keuangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, hipotesis yang sesuai dengan pemaparan di atas adalah:

H<sub>4</sub>: ukuran Komite Audit berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba.

#### **Pengaruh Jumlah Rapat Komite Audit terhadap Praktik Manajemen Laba**

Soliman dan Ragab (2014) dan Xie, Davidson, dan Dadalt (2003) mengungkapkan bahwa intensitas rapat Komite Audit berhubungan secara negatif dengan praktik manajemen laba. Pernyataan tersebut dikonfirmasi oleh Marrakchi Chtourou et al. (2001) yang melaporkan bahwa manajemen laba berhubungan negatif dengan Komite Audit yang seluruh anggotanya merupakan pihak independen dengan jumlah rapat minimal tiga kali dalam setahun. Xie et al. (2003) juga melaporkan bahwa Komite Audit lebih sering bertemu akan memiliki posisi yang lebih baik untuk memantau masalah-masalah seperti manajemen laba. Oleh karena itu, hipotesis yang sesuai dengan pemaparan di atas adalah:

H<sub>5</sub>: jumlah rapat Komite Audit berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba.

#### **Pengaruh Ukuran DPS terhadap Praktik Manajemen Laba**

Quttainah et al. (2013) melaporkan bahwa ukuran DPS adalah mekanisme yang efektif dalam mencegah perilaku oportunistik oleh manajer. Dewan dengan jumlah anggota yang lebih besar akan memiliki beberapa keunggulan seperti keahlian yang lebih beragam dan hubungan lingkungan (Kolsi dan Grassa, 2017). Anggota DPS harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan baik dalam fungsi pasar keuangan dan prinsip syariah untuk meningkatkan transparansi dan mencegah penipuan (Kolsi dan Grassa, 2017). Dengan demikian, Kolsi dan Grassa (2017) mengasumsikan bahwa DPS dengan ukuran yang lebih besar dapat lebih efektif dalam meminimalisasi terjadinya manajemen laba daripada dewan yang berukuran kecil. Dengan demikian, hipotesis yang sesuai dengan pemaparan di atas adalah:

H<sub>6</sub>: ukuran DPS berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba.

#### **Pengaruh Jumlah Rapat DPS terhadap Praktik Manajemen Laba**

Xie et al. (2003) mengungkapkan bahwa terkait dengan tugas pengawasan terhadap manajer, frekuensi rapat dewan berperan penting dalam meminimalisir kecenderungan manajer untuk melakukan manajemen laba. Pernyataan tersebut diharapkan dapat diterapkan terhadap DPS mengingat bahwa DPS juga melaksanakan tugas pengawasan, yaitu mengawasi kesesuaian operasi perusahaan dengan prinsip-prinsip syariah (hukum Islam) (Shittu, Ahmad, dan Ishak, 2016). Vafeas (1999) melaporkan bahwa pertemuan dewan yang sering dilakukan akan menghasilkan peningkatan kinerja. Hasil penelitian tersebut dikonfirmasi oleh Hendra (2017) yang menyatakan bahwa tingginya intensitas pertemuan DPS akan menyebabkan peningkatan kualitas keputusan atau kebijakan. Mendukung penelitian-penelitian tersebut, Vafeas (1999) juga menyatakan bahwa tingginya intensitas pertemuan dewan akan meminimalisasi terjadinya perilaku diskresioner oleh manajer. Berdasarkan pemaparan di atas, maka hipotesis yang sesuai dengan penjelasan di atas adalah:

H<sub>7</sub>: jumlah rapat DPS berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba

#### **Pengaruh Kompetensi DPS terhadap Praktik Manajemen Laba**

Penelitian Kanagaretnam, Lobo, dan Wang (2014) menunjukkan bahwa penerapan prinsip keagamaan akan mengurangi manajemen laba melalui CKPN. Mengingat bahwa DPS bertugas memantau kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah, maka kualitas DPS berpengaruh terhadap pengurangan praktik manajemen laba. Dari sudut pandang pengguna laporan DPS, Rafay dan Farid (2018) mendukung penelitian tersebut. Rafay dan Farid (2018) menjelaskan bahwa dalam melakukan pengambilan keputusan berdasarkan perspektif islam, investor dan pengguna teknis laporan kinerja akan menggunakan laporan DPS sebagai bahan pertimbangan. Dengan demikian, dari sudut pandang investor, bank syariah yang bebas dari praktik manajemen laba dapat diidentifikasi berdasarkan laporan DPS. Dalam hal ini, kompetensi DPS sangat diperlukan dalam meyakinkan investor melalui laporan yang dibuat. Dengan demikian, hipotesis ke-8 yang sesuai dengan penjelasan di atas adalah:

H<sub>8</sub>: kompetensi DPS berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba.

## METODE PENELITIAN

### Variabel Penelitian

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen laba, yang diukur menggunakan CKPN diskresioner. Variabel independen terdiri dari ukuran Dewan Komisaris, independensi Dewan Komisaris, jumlah rapat Dewan Komisaris, ukuran Komite Audit, jumlah rapat Komite Audit, ukuran DPS, jumlah rapat DPS, dan kompetensi DPS. Sedangkan variabel kontrol terdiri dari tingkat pertumbuhan aset dan BIG 4. Variabel ukuran Dewan Komisaris diukur berdasarkan jumlah keseluruhan anggota Dewan Komisaris. Demikian pula untuk variabel ukuran Komite Audit dan ukuran DPS, kedua variabel tersebut diukur berdasarkan keseluruhan jumlah anggota. Variabel independensi Dewan Komisaris diukur menggunakan proporsi Dewan Komisaris Independen dalam keanggotaan Dewan Komisaris. Variabel jumlah rapat diukur berdasarkan frekuensi rapat selama satu tahun, masing-masing untuk variabel jumlah rapat Dewan Komisaris, Komite Audit, dan DPS. Variabel kompetensi DPS diukur berdasarkan persentase anggota DPS yang mempunyai keahlian akuntansi dan auditing.

### Penentuan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum syariah (BUS) yang terdaftar pada direktori perbankan Bank Indonesia. Peneliti menerapkan metode *purposive sampling* pada proses pemilihan sampel. Dengan menerapkan metode tersebut, peneliti dapat menyesuaikan sampel dengan kebutuhan penelitian. Adapun karakteristik sampel yang dibutuhkan adalah:

1. Bank Umum Syariah.
2. Mempublikasikan Laporan Tahunan selama tahun 2013-2017.
3. Menyediakan data yang mendukung atau berhubungan dengan variabel-variabel yang dibutuhkan dalam penelitian.

Secara ringkas, penentuan sampel penelitian dijelaskan dalam tabel 2.

**Tabel 2**  
**Penentuan Sampel Penelitian**

Kriteria Sampel	Jumlah Perusahaan	Tahun	Jumlah Perusahaan x Tahun
Bank Umum Syariah yang tercatat di Direktori Perbankan Bank Indonesia pada tahun 2013-2017	11	5	55
Tidak menyajikan laporan tahunan lengkap selama tahun 2013-2017	0	0	(0)
Mempublikasikan laporan tahunan lengkap selama tahun 2013-2017	11	5	55
Bank Umum Syariah yang tidak menyediakan data yang mendukung atau berhubungan dengan variabel-variabel penelitian	1	1	(5)
	1	2	
	1	2	
<b>Jumlah Sampel</b>			<b>50</b>

Sumber: Direktori Perbankan Bank Indonesia

### Metode Analisis

Regresi data panel dilakukan dengan menerapkan pendekatan dua tahap untuk menguji hubungan antara mekanisme tata kelola perusahaan dan manajemen laba pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Pada tahap pertama, peneliti menentukan nilai dari komponen CKPN diskresioner yang merupakan proksi dari manajemen laba. CKPN diskresioner ditentukan berdasarkan nilai residual dari regresi pada persamaan berikut:

$$CKPND_{it} = CKPN_{it} - [\beta_0 + \beta_1 CKPN_{it-1} + \beta_2 \Delta NPL + \beta_3 \Delta TP]$$

Pada tahap kedua, peneliti menguji hubungan antara mekanisme tata kelola perusahaan dan manajemen laba. Penelitian ini menggunakan nilai absolut CKPN diskresioner untuk mengukur manajemen laba. Beberapa penelitian seperti Khalil dan Aydin (2016), Lassoued et al. (2017), dan Quttainah et al. (2013) juga menggunakan nilai absolut dari CKPN untuk mengukur manajemen laba. Persamaan regresi tahap II dapat dituliskan sebagai berikut:



$$|CKPND_{it}| = \beta_1 + \beta_2 BOC\_SIZE_{it} + \beta_3 BOC\_INDEP_{it} + \beta_4 BOC\_MEET_{it} + \beta_5 AUDITCOMM\_SIZE_{it} + \beta_6 AUDITCOMM\_MEET_{it} + \beta_7 SSB\_SIZE_{it} + \beta_8 SSB\_MEET_{it} + \beta_9 SSB\_COMP_{it} + \beta_{10} GR\_ASS_{it} + \beta_{11} BIG_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

$|CKPND_{it}|$ : Nilai absolut dari CKPN diskresioner pada bank i pada tahun t

$BOC\_SIZE_{it}$ : Ukuran Dewan Komisaris pada bank i pada tahun t

$BOC\_INDEP_{it}$ : Independensi Dewan Komisaris pada bank i pada tahun t

$BOC\_MEET_{it}$ : Jumlah Rapat Dewan Komisaris pada bank i pada tahun t

$AUDITCOMM\_SIZE_{it}$ : Ukuran Komite Audit pada bank i pada tahun t

$AUDITCOMM\_MEET_{it}$ : Jumlah Rapat Komite Audit pada bank i pada tahun t

$SSB\_SIZE_{it}$ : Ukuran Dewan Pengawas Syariah (*Sharia Supervisory Board*) pada bank i pada tahun t

$SSB\_MEET_{it}$ : Jumlah Rapat DPS pada bank i pada tahun t

$SSB\_COMP_{it}$ : Kompetensi DPS pada bank i pada tahun t

$GR\_ASS_{it}$ : Pertumbuhan Aset pada bank i pada tahun t

$BIG_{it}$ : Perusahaan Audit (BIG 4) pada bank i pada tahun t

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Sampel Penelitian

Objek penelitian yang digunakan adalah Bank Umum Syariah yang tercatat di Direktori Perbankan Bank Indonesia pada tahun 2013-2017. Metode purposive sampling diterapkan pada saat pengambilan sampel dengan beberapa karakteristik sampel. Pengumpulan data dari Direktori Perbankan Bank Indonesia menghasilkan 11 perusahaan yang telah sesuai dengan karakteristik sampel yang dibutuhkan dalam penelitian. Karakteristik tersebut yaitu mempublikasikan Laporan Tahunan selama tahun 2013-2017 dan menyediakan data yang mendukung atau berhubungan dengan variabel-variabel yang dibutuhkan dalam penelitian. Daftar Bank Umum Syariah yang dijadikan sampel disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 3**  
**CKPN Diskresioner pada BUS Tahun 2017**

No	BUS	CKPN Diskresioner (dalam miliaran rupiah)
1	BCAS	59,42
2	BRIS	651,43
3	BNIS	348,44
4	BSM	767,38
5	BBS	162,93
6	BMS	15,18
7	BMS	452,00
8	BPS	416,51
9	BVS	8,26
10	BMSI	49,98
11	BJBS	804,33

Sumber: Direktori Perbankan Bank Indonesia

### Deskripsi Variabel

Nilai rata-rata  $|DCKPN|$  yang merupakan proksi dari manajemen laba adalah 244,36 dengan nilai deviasi standar sebesar 286,65.  $DCKPN$  memiliki nilai terendah sebesar 1,55 yaitu PT Bank Maybank Syariah Indonesia dan nilai tertinggi sebesar 1.204,07 yaitu PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada 11 BUS yang dijadikan sampel, terjadi praktik manajemen laba.

### Pembahasan Hasil Penelitian

Uji F pada model regresi tahap I menunjukkan bahwa nilai F statistik sebesar 19,03 dengan nilai signifikansi 0,00. Hasil uji F yang signifikan tersebut mengindikasikan bahwa variabel CKPNit-1,  $\Delta$ NPLit, dan  $\Delta$ TLit secara simultan berpengaruh terhadap CKPN. Probabilitas F statistik tersebut juga mengkonfirmasi kesesuaian teknik yang digunakan dalam penelitian.

Uji F pada model regresi tahap II menunjukkan bahwa nilai F statistik sebesar 6,12 dengan nilai signifikansi 0,00. Nilai probabilitas F statistik yang signifikan tersebut mengindikasikan bahwa variabel BOC\_SIZEit, BOC\_INDEPit, BOC\_MEETit, AUDITCOMM\_SIZEit, AUDITCOMM\_MEETit, SSB\_SIZEit, SSB\_MEETit, SSB\_COMPit secara simultan mempengaruhi manajemen laba. Selain itu, nilai probabilitas F statistik tersebut juga menegaskan kesesuaian teknik untuk penelitian ini.

Hipotesis pertama yang diusulkan adalah ukuran Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba. Berdasarkan tabel 4, nilai koefisien regresi untuk BOC\_SIZE adalah 114,55 dengan tingkat signifikansi 0,00, yang berarti bahwa ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap praktik manajemen laba. Dengan demikian, hipotesis pertama ditolak. Alasan yang mendasari penelitian tersebut adalah karena tidak ada jaminan bahwa masing-masing anggota Dewan Komisaris berkontribusi secara efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap manajer. Jumlah penumpang gratis (free rider) akan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah anggota Dewan Komisaris, sehingga sebagian dari anggota Dewan Komisaris kemungkinan tidak berkontribusi secara efektif terhadap pengendalian manajemen laba. Hasil penelitian tersebut serupa dengan penelitian terdahulu, seperti Beasley (1996), Lipton dan Lorsch (1992), dan Rahman dan Ali (2006) yang melaporkan bahwa ukuran Dewan Komisaris yang besar berpengaruh positif terhadap praktik manajemen laba oleh manajer.

**Tabel 4**  
**Hasil Analisis Regresi**

Variables	Coefficient Estimate	t-Statistics	p-value
C	-776,29	-3,12	0,00
BOC_SIZE	114,55	3,03	0,00
BOC_INDEP	-97,89	-0,51	0,62
BOC_MEET	1,27	0,76	0,45
AUDCOMM_SIZE	83,43	2,68	0,01
AUDCOMM_MEET	-2,95	-0,75	0,46
SSB_SIZE	202,03	2,87	0,01
SSB_MEET	-1,04	-0,16	0,87
SSB_COMP	-240,57	-2,08	0,04
GR_ASS	-184,87	-1,75	0,09
BIG	-48,58	-0,80	0,43

Sumber: Olahan Data Sekunder

Hipotesis kedua yang diusulkan adalah independensi Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba. Nilai koefisien untuk BOC\_INDEP adalah -97,89 dengan tingkat signifikansi 0,62. Dengan demikian, peneliti gagal untuk membuktikan hipotesis kedua, yang berarti bahwa independensi Dewan Komisaris tidak mempengaruhi praktik manajemen laba. Alasan yang mendasari hasil penelitian ini adalah karena peneliti tidak dapat memastikan bahwa anggota Dewan Komisaris Independen benar-benar bersifat independen. Rahman dan Ali (2006) juga melaporkan bahwa independensi Dewan Komisaris tidak mempengaruhi praktik manajemen laba. Bertentangan dengan hal tersebut, Kolsi dan Grassa (2017) dan Ebrahim (2007) mengungkapkan bahwa independensi Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba.

Hipotesis ketiga yang diusulkan adalah jumlah rapat Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba. Nilai koefisien untuk BOC\_MEET adalah 1,27 dengan tingkat signifikansi 0,45. Dengan demikian, penelitian ini gagal membuktikan pengaruh negatif rapat Dewan Komisaris terhadap praktik manajemen laba. Alasan yang mendasari hasil penelitian tersebut adalah karena peneliti tidak dapat mengukur kualitas rapat dan seberapa jauh tindak lanjut dari hasil rapat yang telah dilaksanakan. Selain itu, peneliti tidak dapat menentukan persentase rapat yang membahas pemecahan masalah manajemen laba. Ebrahim (2007) juga melaporkan bahwa jumlah rapat Dewan Komisaris tidak mempengaruhi manajemen laba. Dalam penelitiannya tersebut, Ebrahim (2007) juga melaporkan bahwa jumlah rapat Dewan Komisaris tahunan tidak memoderasi praktik manajemen laba.

Hipotesis ke-empat yang diajukan adalah ukuran Komite Audit berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba. Nilai koefisien untuk AUDITCOMM\_SIZE sebesar 83,43 dengan tingkat signifikansi 0,01, yang berarti bahwa ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap praktik manajemen laba. Dengan demikian, hipotesis ke-empat ditolak. Alasan yang mendasari penelitian tersebut adalah karena tidak ada jaminan bahwa setiap anggota Komite Audit berkontribusi secara efektif dalam mengawasi penyusunan laporan keuangan sehingga terhindar dari praktik manajemen laba. Dengan kata lain, peneliti tidak dapat memastikan apakah Komite Audit terhindar dari masalah penumpang gratis (*free rider*). Penelitian ini menyanggah penelitian Bédard et al. (2004) yang melaporkan bahwa ukuran Komite Audit yang besar akan semakin mempermudah pengungkapan dan penyelesaian potensi masalah dalam proses pelaporan keuangan. Selain itu, Hamdi dan Zarai (2014) juga melaporkan bahwa Komite Audit audit memiliki peran yang lebih signifikan dalam memoderasi manajemen laba dibandingkan dengan aspek tata kelola perusahaan yang lain.

Hipotesis kelima penelitian ini adalah jumlah rapat Komite Audit berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba. Berdasarkan tabel 4 dapat diidentifikasi nilai koefisien untuk AUDITCOMM\_MEET adalah -2,95 dengan tingkat signifikansi 0,45. Dengan demikian, jumlah rapat Komite Audit tidak mempengaruhi praktik manajemen laba. Alasan yang mendasari penelitian tersebut adalah karena karena peneliti tidak dapat menentukan persentase rapat yang membahas pemecahan masalah manajemen laba. Disamping itu, peneliti tidak dapat mengukur kualitas rapat dan seberapa jauh tindak lanjut dari hasil rapat yang telah dilaksanakan. Bédard et al. (2004) juga mengungkapkan bahwa jumlah rapat Komite Audit tidak mempengaruhi terjadinya manajemen laba. Akan tetapi, Kolsi dan Grassa (2017) melaporkan adanya hubungan negatif antara jumlah rapat Komite Audit dengan praktik manajemen laba.

Pengujian hipotesis ke-enam menghasilkan nilai koefisien untuk SSB\_SIZE sebesar 202,03 dengan tingkat signifikansi 0,01, yang berarti bahwa ukuran DPS berpengaruh dengan arah positif terhadap praktik manajemen laba. Dengan demikian, hipotesis ke-enam ditolak. Alasan yang mendasari hasil penelitian adalah karena peneliti tidak dapat memastikan bahwa DPS terbebas dari masalah penumpang gratis (*free rider*). Dengan kata lain, penelitian ini tidak dapat mengkonfirmasi apakah setiap anggota DPS berkontribusi secara efektif dalam memastikan kesesuaian aktivitas perusahaan terhadap prinsip syariah sehingga terhindar dari praktik manajemen laba. Hasil penelitian tersebut serupa dengan penelitian yang dilakukan Mersni dan Ben Othman (2016) yang melaporkan bahwa ukuran DPS berpengaruh dengan arah positif terhadap praktik manajemen laba. Jensen (1993) juga menyatakan bahwa jumlah anggota dewan yang sedikit lebih efektif karena terhindar dari masalah penumpang gratis.

Hipotesis ketujuh yang diusulkan adalah jumlah rapat DPS berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba. Nilai koefisien untuk SSB\_MEET adalah -1,04 dengan tingkat signifikansi 0,87. Dengan demikian, jumlah rapat DPS tidak berpengaruh terhadap praktik manajemen laba. Alasan yang melatarbelakangi hasil penelitian tersebut adalah karena DPS tidak terlibat dalam pembuatan kebijakan keuangan. Selain itu, peneliti tidak dapat mengukur kualitas rapat dan seberapa jauh tindak lanjut hasil rapat yang telah dilaksanakan. Hendra (2017) juga melaporkan bahwa jumlah rapat DPS tidak berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laba. Hal tersebut juga diperkuat oleh penelitian Hamdi dan Zarai (2014) yang melaporkan bahwa DPS tidak mempunyai pengaruh dalam mengurangi praktik manajemen laba.

Hipotesis terakhir yang diajukan adalah kompetensi DPS berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba. Nilai koefisien untuk SSB\_COMP yang didapatkan dari hasil regresi



adalah -240,57 dengan tingkat signifikansi 0,04. Dengan demikian, hipotesis terakhir diterima, yang berarti bahwa kompetensi DPS berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba. Alasan yang mendasari hasil penelitian tersebut adalah karena kompetensi DPS yang tercermin dari laporan DPS sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan investor berdasarkan perspektif islam. Dengan demikian, dari sudut pandang investor, bank syariah yang bebas dari praktik manajemen laba dapat diidentifikasi berdasarkan laporan DPS. Hasil penelitian tersebut dikonfirmasi oleh Mersni dan Ben Othman (2016). Akan tetapi, Hendra (2017) melaporkan bahwa kompetensi DPS tidak berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laba. Demikian juga dengan Hamdi dan Zarai (2014) yang gagal membuktikan adanya pengaruh negatif kompetensi DPS terhadap manajemen laba.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran Dewan Komisaris, ukuran Komite Audit, dan ukuran DPS berpengaruh positif terhadap praktik manajemen laba. Selain itu, penelitian ini mengkonfirmasi bahwa kompetensi DPS berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba. Dengan demikian, atribut tata kelola perusahaan yang dapat meminimalisasi praktik manajemen laba adalah kompetensi DPS. Sedangkan atribut tata kelola perusahaan yang lain, yaitu independensi Dewan Komisaris, jumlah rapat Dewan Komisaris, jumlah rapat Komite Audit, dan jumlah rapat DPS tidak terbukti berpengaruh terhadap praktik manajemen laba.

Beberapa keterbatasan penelitian ini diantaranya adalah peneliti tidak dapat mengkonfirmasi bahwa data yang menyajikan informasi mengenai Independensi Dewan Komisaris pada laporan tahunan perusahaan menunjukkan Dewan Komisaris yang benar-benar bersifat independen. Selain itu, peneliti tidak dapat menentukan persentase rapat yang membahas masalah manajemen laba dan menindaklanjuti masalah tersebut. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa rapat yang dilaksanakan tidak membahas masalah yang berkaitan dengan praktik manajemen laba.

Saran yang diajukan bagi perbankan adalah agar dapat mengimplementasikan mekanisme tata kelola yang efektif guna meminimalisasi kemungkinan terjadinya praktik manajemen laba. Sedangkan bagi peneliti selanjutnya, agar dapat menelusuri kevalidan data independensi Dewan Komisaris dan keterkaitan antara rapat dengan pemecahan masalah manajemen laba.

## REFERENSI

- Al-najjar, B. (2017). The Determinants of the Frequency of Board Meetings : Evidence from Categorical Analysis. *Journal of Applied Accounting Research*, (January 2011). <https://doi.org/10.2139/ssrn.1733224>
- Bendickson, J., Muldoon, J., W, E., Philip, L., & Davis, E. (2016). Agency Theory: Background and Epistemology. *Journal of Management History*, 22(4).
- Cadbury Committee. Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance (1992).
- Chen, G., Firth, M., Gao, D. N., & Rui, O. M. (2006). Ownership structure, Corporate Governance, and Fraud : Evidence from China. *Journal of Corporate Finance*, 12 (2006) 424–448, 12, 424–448. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2005.09.002>
- Chong, B. S., & Liu, M. H. (2009). Islamic banking: Interest-free or interest-based? *Pacific Basin Finance Journal*, 17(1), 125–144. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2007.12.003>
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. *The Academy of Management Review*, 14(1), 57–74.
- Hendra, G. I. (2017). Analysis of The Effect of Shariah Supervisory Board (SSB) Function on Earning Quality of Islamic Banks. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*,

10(2), 143–161.

Imam, P., & Kpodar, K. (2016). Islamic banking: Good for growth? *Economic Modelling*, 59, 387–401. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2016.08.004>

Jensen, M. C. (1993). The Modern Industrial Revolution , Exit , and the Failure of Internal Control Systems. *The Journal of Finance*, 48(3).

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*.

Joubert, H., & Fakhfakh, H. (2011). Earnings management and board oversight : an international comparison. *Managerial Auditing Journal*, 26(1), 66–86. <https://doi.org/10.1108/02686901211186108>

Kanagaretnam, K., Lobo, G. J., & Wang, C. (2014). Religiosity and Earnings Management: International Evidence from the Banking Industry. *Journal of Business Ethics*, 132(2). <https://doi.org/10.1007/s10551-014-2310-9>

Khalil, M., & Aydin, O. (2016). Board Independence , Audit Quality and Earnings Management : Evidence from Egypt. *Journal of Emerging Market Finance*, 15(1), 1–35. <https://doi.org/10.1177/0972652715623701>

Kolsi, M. C., & Grassa, R. (2017). Did corporate governance mechanisms affect earnings management ? Further evidence from GCC Islamic banks. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 10(1).

Lassoued, N., Attia, M. B. R., & Sassi, H. (2017). Earnings management in islamic and conventional banks: Does ownership structure matter? Evidence from the MENA region. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 30, 85–105. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2017.12.003>

Liu, Q., & Lu, Z. (Joe). (2007). Corporate governance and earnings management in the Chinese listed companies: A tunneling perspective. *Journal of Corporate Finance*, 13(5), 881–906. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2007.07.003>

Marrakchi Chtourou, S., Bédard, J., & Courteau, L. (2001). Corporate Governance and Earnings Management. *SSRN*, 4(April), 1–35. <https://doi.org/10.2139/ssrn.275053>

Mersni, H., & Ben Othman, H. (2016). The impact of corporate governance mechanisms on earnings management in Islamic banks in the Middle East region. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 7(4), 318–348. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2014-0039>

Othman, H. Ben, & Mersni, H. (2014). The use of discretionary loan loss provisions by Islamic banks and conventional banks in the Middle East region: A comparative study. *Studies in Economics and Finance*, 31(1), 106–128. <https://doi.org/10.1108/SEF-02-2013-0017>

Peasnell, K. V., Pope, P. F., & Young, S. (2005). Board Monitoring and Earnings Management : Do Outside Directors Influence Abnormal Accruals ? *Journal of Business Finance and Accounting*, 32(7), 1311–1346.

- Quttainah, M. A., Song, L., & Wu, Q. (2013). Do Islamic Banks Employ Less Earnings Management ? *Journal of International Financial Management and Accounting*, 24(3).
- Rafay, A., & Farid, S. (2018). Shariah Supervisory Board Report (SSBR) in Islamic banks: An experimental study of investors' perception and behavior. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(2), 274–296.  
<https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2017-0180>
- Roodposhti, F. R., & Chashmi, S. A. N. (2010). The Effect of Board Composition and Ownership Concentration on Earnings Management : Evidence from Iran. *International Journal of Economics and Management Engineering*, 4(6), 673–679.
- Saleh, N. M., Iskandar, T. M., & Rahmat, M. M. (2005). Earnings Management and Board Characteristics: Evidence from Malaysia. *Jurnal Pengurusan*, 24, 77–103.
- Shittu, I., Ahmad, A. C., & Ishak, Z. (2016). Board Characteristics and Earnings Per Share of Malaysian Islamic Banks. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6, 135–137.
- Soliman, M. M., & Ragab, A. A. (2014). Audit Committee Effectiveness, Audit Quality and Earnings Management : An Empirical Study of the Listed Companies in Egypt. *Research Journal of Finance and Accounting*, 5 No. 2.
- Sun, J., & Liu, G. (2013). Auditor industry specialization , board governance , and earnings management. *Managerial Auditing Journal*, 28(1), 45–64.  
<https://doi.org/10.1108/02686901311282498>
- Vafeas, N. (1999). Board Meeting Frequency and Firm Performance. *Journal of Financial Economics*, 53, 113–142. [https://doi.org/10.1016/S0304-405X\(99\)00018-5](https://doi.org/10.1016/S0304-405X(99)00018-5)
- Xie, B., Davidson, W. N., & Dadalt, P. J. (2003). Earnings Management and Corporate Governance: The Role of The Board and The Audit Committee. *Journal of Corporate Finance*, 9, 295–316.